



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

APRESIASI DAN CATATAN KINERJA PELAYANAN MUDIK 2022

Sidiq Budi Sejati
Peneliti Pertama
sidiq.sejati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mudik dan arus balik 2022 sudah sangat baik. Langkah-langkah pemerintah beserta jajaran cukup membawa dampak yang positif. ORI berharap strategi dalam mengatur arus mudik dan arus balik 2022 dapat dikembangkan lagi di tahun mendatang, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang semakin baik. ORI hanya memberikan catatan terkait dengan pelayanan penerbangan yang berkurang dikarenakan banyak maskapai yang *collapse* sehingga tidak bisa memenuhi jatah jumlah pesawat yang dapat terbang. Kebijakan untuk *oneway* arus mudik maupun arus balik yang digunakan oleh pihak Kepolisian dalam menjaga arus lalu lintas juga dapat dilaksanakan dengan baik. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada momentum mudik 2022 juga menjadi bukti kerja keras pemerintah beserta jajaran dalam menjaga situasi di jalan. Kebijakan penambahan gerbong pada kereta api merupakan langkah tepat, dan untuk ke depannya yang perlu ditambah adalah frekuensi perjalanannya karena untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik yang tergolong luar biasa.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik juga mengungkapkan 73,8 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani mudik lebaran 2022. Kepuasan masyarakat paling besar dikarenakan dapat merayakan lebaran di kampung halaman dan dapat berkumpul bersama keluarga. Sementara rasa ketidakpuasan dikarenakan warga mengalami kemacetan lalu lintas dimana-mana disusul dengan harga-harga yang meningkat jauh lebih tinggi. Dalam survei ini juga dikatakan bahwa kinerja Kementerian Perhubungan dan Kepolisian memiliki peran yang signifikan dalam kelancaran arus mudik lebaran tahun ini.

Pihak Kepolisian dinilai berhasil melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dalam menunjang strategi antisipasi arus mudik. Kepolisian telah menyiapkan 7 (tujuh) cara mencegah kepadatan lalu lintas yang di antaranya adalah melakukan sistem satu arah, manajemen sistem di *rest area* (RAMS) sampai dengan menyiapkan rute alternatif. Selain itu, kesuksesan ini juga dinilai karena Kepolisian dapat melakukan pemanfaatan teknologi dan transformasi digital secara optimal, dimana Kepolisian selalu memberikan informasi atau data-datanya yang akurat dan bahkan cepat frekuensi kejadiannya (*real time*) seputar kondisi jalur tol, peta jalan, hingga memantau kepadatan melalui CCTV serta mampu memperkirakan berapa jumlah personel yang perlu diturunkan dalam suatu titik wilayah tertentu.

Ketua DPR RI, Puan Maharani turut memberikan apresiasi kerja pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan mudik selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Meskipun sudah berjalan baik Ketua DPR RI Puan Maharani masih memberikan sejumlah catatan terkait belum maksimalnya layanan mudik 2022, seperti halnya terkait upaya rekayasa lalu lintas di jalan tol belum sepenuhnya mampu mencegah penumpukan kendaraan. Hal ini juga diakui oleh Kementerian Perhubungan, dan pihaknya berjanji akan mengevaluasi kembali agar kegiatan mudik dan kegiatan lain yang dimana akan ada pergerakan masif di masa yang akan datang dapat diantisipasi dengan lebih baik.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI perlu mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat terus mengawasi tindak lanjut pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan mudik lebaran pada tahun berikutnya. Meskipun sudah dinilai baik secara umum, tetapi masih perlu beberapa perbaikan. Sinergitas antar lembaga pemerintah dengan partisipasi pihak swasta perlu diperkuat kembali terutama koordinasi Kementerian Perhubungan dengan para stakeholdersnya yang terkait, termasuk dengan pihak Kepolisian. Pemerintah juga perlu menjamin kebutuhan masyarakat terkait mudik, mulai dari informasi kebijakan perjalanan yang akurat, ketersediaan dan harga tiket yang kompetitif, kemudahan pasokan dan harga bahan bakar yang ekonomis, informasi unit cepat tanggap, tempat istirahat (rest area) yang layak serta pilihan jalur alternatif yang aman. Bahkan tidak hanya saat mudik, Ombudsman dapat pula meminta strategi pengaturan lalu lintas yang digunakan saat mudik juga dapat digunakan untuk mengurai kemacetan yang terjadi dimana saja sebagai akibat mobilitas kegiatan tertentu.

Sumber

detiknews.com, 12, 15, dan 16 Mei 2022;
kompas.com, 16 Mei 2022;
republika.co.id, 17 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022